



Dinamika Sosial Dan Relasi Kuasa Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran PAI Di Sekolah Dasar Islam Terpadu

Alivia Aniatun Amiroh¹, Muh. Hanif²

^{1,2}Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Mei 10, 2026

Revised Mei 15, 2026

Accepted Mei 20, 2026

Kata Kunci:

Kurikulum Merdeka,
Pembelajaran PAI,
Relasi kuasa,
Dinamika sosial,
SDIT

Keywords:

*Independent Curriculum,
Islamic Religious Education
learning,
power relations,
social dynamics,
Islamic Elementary Schools*

ABSTRAK

Dinamika sosial dan relasi kuasa dalam penerapan kurikulum merdeka pada pembelajaran PAI menjadi isu penting. Penerapan Kurikulum Merdeka pada PAI SDIT membuka ruang diferensiasi dan proyek, tetapi juga memunculkan negosiasi otoritas antara kebijakan, kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika sosial dan relasi kuasa dalam penerapan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran PAI di Sekolah Dasar Islam Terpadu dengan menempatkan relasi kuasa-pengetahuan Michel Foucault dan sosiologi kurikulum sebagai lensa utama. Penelitian dirancang menggunakan studi kasus kualitatif pada satuan pendidikan Islam di SD IT Al-Ihsan Banjarnegara. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan kepala sekolah, wakil kurikulum, guru PAI, siswa, orang tua, serta analisis dokumentasi kelembagaan. Analisis data dilakukan secara tematik melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: kebijakan kurikulum sebagai rezim pengetahuan, negosiasi otoritas guru dan partisipasi siswa, serta resistensi adaptif terhadap tuntutan perubahan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik pendidikan Islam tidak hanya berlangsung dalam kegiatan pedagogis di ruang kelas, tetapi juga melibatkan hubungan sosial, relasi kuasa, serta proses pembentukan budaya dan nilai di lingkungan sekolah.

ABSTRACT

The social dynamics and power relations in the implementation of the independent curriculum in Islamic Religious Education (PAI) learning are important issues. The implementation of the Independent Curriculum in Islamic Religious Education (PAI) at Islamic Elementary Schools (SDIT) opens up space for differentiation and projects, but also gives rise to authority negotiations between policymakers, principals, teachers, students, and parents. This study aims to analyze the social dynamics and power relations in the implementation of the Independent Curriculum in Islamic Religious Education (PAI) learning at Integrated Islamic Elementary Schools by utilizing Michel Foucault's power-knowledge relations and the sociology of curriculum as the main lenses. The study was designed using a qualitative case study at the Islamic education unit at Al-Ihsan Islamic Elementary School in Banjarnegara. Data were collected through participant observation, in-depth interviews with the principal, curriculum representatives, Islamic Religious Education (PAI) teachers, students, parents, and analysis of institutional documentation. Data analysis was conducted thematically through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study reveal three main findings: curriculum policy as a knowledge regime, negotiations between teacher authority and student participation, and adaptive resistance to demands for change. These findings indicate that the practice of Islamic education does not only take place in pedagogical

activities in the classroom, but also involves social relations, power relations, and the process of cultural and value formation within the school environment.

This is an open access article under the [CC BY](#) license



Corresponding Author:

Alivia Aniatun Amiroh, Muh.Hanif
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
Purwokerto, Indonesia
Email: aniatunamirohalivia@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Penerapan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) menghadirkan perubahan dalam pola pembelajaran, relasi sosial, dan praktik pendidikan di lingkungan sekolah. Kurikulum Merdeka memberikan ruang pembelajaran yang lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, serta menekankan penguatan karakter melalui pembelajaran kontekstual dan proyek. Dalam praktiknya, perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif kurikulum, tetapi juga memunculkan dinamika sosial dan relasi kuasa antara kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua dalam menentukan arah pembelajaran PAI di sekolah [1]. Michel Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja secara represif, tetapi juga melalui pembentukan pengetahuan, pengawasan, pembiasaan, dan normalisasi dalam kehidupan sosial, termasuk di lembaga pendidikan [2].

Penelitian terdahulu mengenai Kurikulum Merdeka umumnya berfokus pada kesiapan guru, efektivitas implementasi, strategi pembelajaran, serta kendala administratif dalam pelaksanaannya. Penelitian [1] menunjukkan bahwa guru memiliki peran penting dalam membangun pembelajaran berbasis diferensiasi melalui kepemimpinan pedagogis di sekolah Islam dasar. Penelitian lain oleh [3] menjelaskan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka masih dipengaruhi oleh kesiapan guru dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik pembelajaran di kelas. Akan tetapi, kajian mengenai relasi kuasa yang terbentuk dalam interaksi antara kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua dalam pembelajaran PAI masih relatif terbatas. Padahal, praktik pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial, budaya kelembagaan, simbol keagamaan, serta distribusi otoritas yang bekerja dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Dengan demikian, artikel ini menempatkan pembelajaran PAI sebagai arena sosial yang dibentuk oleh aktor, struktur, dan praktik kekuasaan yang saling memengaruhi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mendeskripsikan dinamika sosial dan relasi kuasa dalam penerapan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran PAI di Sekolah Dasar Islam Terpadu. Kedua, mengidentifikasi peran kepala sekolah, wakil kurikulum, guru PAI, guru kelas, siswa, dan orang tua dalam membentuk praktik implementasi kurikulum. Ketiga, menganalisis implikasi dinamika tersebut terhadap penguatan mutu pendidikan Islam berbasis pendekatan sosiologi pendidikan. Kajian ini penting dilakukan karena implementasi kebijakan pendidikan pada dasarnya tidak berlangsung secara netral, melainkan dipengaruhi oleh relasi sosial, kepemimpinan, budaya sekolah, dan proses negosiasi antaraktor pendidikan.

Artikel ini memandang bahwa penerapan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran PAI di SDIT melibatkan tiga bentuk relasi kuasa yang saling berkaitan. Pertama, relasi kuasa struktural antara kebijakan pendidikan nasional dan aktor sekolah sebagai pelaksana kebijakan. Kedua, relasi kuasa di ruang kelas yang tampak melalui interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran,

pengawasan, penilaian, serta pembentukan disiplin belajar. Ketiga, relasi kuasa antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam menentukan legitimasi terhadap praktik pendidikan yang dijalankan lembaga. Ketiga bentuk relasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kurikulum berlangsung melalui proses negosiasi, adaptasi, dan resistensi antaraktor pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi pembelajaran, tetapi juga oleh kemampuan lembaga pendidikan dalam mengelola hubungan sosial, komunikasi, dan pembentukan makna kolektif secara berkelanjutan [4].

Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi konsep penting dalam penelitian ini karena berkaitan langsung dengan perubahan praktik pembelajaran di sekolah. Implementasi Kurikulum Merdeka dipahami sebagai proses penerapan kurikulum yang dilakukan melalui penyesuaian berkelanjutan terhadap kondisi sekolah dan karakteristik peserta didik [5]. Kurikulum ini menekankan pembelajaran berdiferensiasi, penguatan proyek, dan pengembangan kompetensi peserta didik sesuai karakteristik serta kebutuhan belajar masing-masing [1]. Dalam konteks pembelajaran PAI, Kurikulum Merdeka tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi keagamaan, tetapi juga diarahkan pada pembentukan karakter religius, penguatan akhlak, dan kemampuan peserta didik dalam memahami nilai-nilai Islam secara kontekstual [6]. Perubahan tersebut mendorong guru untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan partisipatif sehingga peserta didik memiliki ruang lebih luas dalam proses belajar [3].

Implementasi Kurikulum Merdeka juga menempatkan guru sebagai aktor penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran melalui kemampuan menyesuaikan strategi mengajar dengan kebutuhan peserta didik. Guru tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mengarahkan proses belajar agar lebih kontekstual dan berpusat pada siswa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fleksibilitas kurikulum memberikan ruang bagi guru untuk mengembangkan kreativitas pembelajaran sesuai karakteristik lingkungan sekolah dan latar belakang peserta didik [7]. Dalam pembelajaran PAI, fleksibilitas tersebut tampak pada penggunaan metode diskusi, pembelajaran berbasis proyek, dan penguatan pembiasaan religius yang diintegrasikan dalam kegiatan belajar sehari-hari [8].

Dalam konteks Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), Kurikulum Merdeka tidak dipahami semata sebagai kebijakan administratif, melainkan hadir dalam praktik sosial dan budaya sekolah sehari-hari. Implementasi kurikulum tampak pada penyusunan modul ajar, pembiasaan religius, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar, serta pola interaksi antara guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran [9]. Praktik tersebut menunjukkan bahwa penerapan kurikulum dipengaruhi oleh budaya kelembagaan, visi sekolah, serta cara warga sekolah memaknai keberhasilan pembelajaran dan perubahan perilaku peserta didik [10]. Dengan demikian, implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PAI tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial yang berkembang di lingkungan sekolah Islam terpadu [11].

Konsep relasi kuasa-kepengetahuan digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan hubungan antara aktor, struktur, dan praktik pendidikan dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Foucault memandang bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui dominasi langsung, tetapi juga melalui produksi pengetahuan, regulasi, klasifikasi, dan normalisasi terhadap praktik yang dianggap benar dalam suatu lembaga [2]. Dalam bidang pendidikan, mekanisme tersebut tampak melalui kurikulum, aturan sekolah, sistem evaluasi, dan praktik disiplin yang diterapkan dalam kehidupan pembelajaran sehari-hari [4]. Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian [12] yang menunjukkan bahwa pendidikan dapat menjadi arena reproduksi kekuasaan sekaligus ruang pembentukan kesadaran sosial melalui praktik pedagogis yang berlangsung di lembaga pendidikan. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjadi ruang pembelajaran, tetapi juga menjadi ruang pembentukan pengetahuan, nilai, dan pola perilaku tertentu [13].

Konsep relasi kuasa-kepengetahuan membantu menjelaskan bagaimana keputusan, pembiasaan, simbol, dan strategi kelembagaan membentuk pola tindakan yang dianggap ideal di lingkungan sekolah.

Praktik supervisi akademik, pengaturan disiplin kelas, sistem penilaian, hingga pembiasaan religius merupakan bagian dari mekanisme kekuasaan yang bekerja dalam kehidupan sekolah sehari-hari [2]. Melalui proses tersebut, sekolah membentuk standar perilaku tertentu yang diharapkan dapat diikuti oleh guru maupun peserta didik [14]. Oleh karena itu, penerapan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PAI tidak hanya berkaitan dengan perubahan metode pembelajaran, tetapi juga menyangkut pembentukan budaya sekolah dan legitimasi terhadap praktik pendidikan tertentu [15].

Relasi kuasa dalam pendidikan juga tampak melalui proses pengawasan dan pembentukan kedisiplinan yang berlangsung secara terus-menerus di lingkungan sekolah. Guru, kepala sekolah, dan aturan kelembagaan bekerja sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial yang membentuk perilaku peserta didik sesuai nilai dan norma yang berlaku di sekolah. Dalam perspektif Foucault, praktik disiplin tersebut tidak hanya bersifat represif, tetapi juga produktif karena menghasilkan pola perilaku, kebiasaan, dan identitas tertentu dalam kehidupan sosial [4]. Oleh karena itu, pembiasaan religius, tata tertib sekolah, dan sistem evaluasi pembelajaran dapat dipahami sebagai bagian dari praktik kekuasaan yang bekerja melalui proses normalisasi dalam lembaga pendidikan.

Dinamika sosial kelas PAI menjadi konsep ketiga yang memperkuat analisis penelitian ini karena berkaitan dengan hubungan antaraktor dalam proses pembelajaran. Dinamika sosial kelas terbentuk melalui interaksi antara guru, peserta didik, orang tua, dan budaya sekolah dalam kehidupan pendidikan sehari-hari [14]. Dalam pembelajaran PAI, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai figur yang membentuk nilai, sikap, dan budaya religius peserta didik [6]. Di sisi lain, peserta didik memiliki ruang untuk memberikan respons, menyampaikan pendapat, dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran sesuai pendekatan Kurikulum Merdeka [8]. Pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik mendorong keterlibatan siswa secara lebih aktif dalam proses belajar, sehingga interaksi antara guru dan siswa berlangsung lebih dialogis dan partisipatif [16]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang kelas merupakan arena sosial yang dipengaruhi oleh komunikasi, pengalaman, serta kepentingan masing-masing aktor pendidikan [13].

Interaksi antara guru dan peserta didik dalam pembelajaran PAI memperlihatkan bahwa ruang kelas bukan hanya tempat berlangsungnya transfer pengetahuan, tetapi juga arena pembentukan pengalaman sosial dan religius peserta didik. Suasana pembelajaran yang dialogis memungkinkan siswa untuk terlibat lebih aktif dalam menyampaikan pendapat, bertanya, maupun bekerja sama dengan teman sebaya dalam kegiatan belajar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka mendorong terbentuknya hubungan belajar yang lebih partisipatif dan komunikatif antara guru dan siswa [16]. Dengan demikian, dinamika sosial kelas dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam membangun komunikasi, menciptakan suasana belajar yang kondusif, dan mengelola keberagaman karakter peserta didik dalam proses pembelajaran.

Ketiga konsep dalam penelitian ini saling berkaitan dalam menjelaskan praktik pendidikan Islam di SDIT. Konsep Kurikulum Merdeka dalam PAI digunakan untuk memahami perubahan praktik pembelajaran yang berlangsung di sekolah [1]. Konsep relasi kuasa-kepengetahuan membantu menjelaskan mekanisme kelembagaan dan hubungan antaraktor dalam praktik pendidikan [2]. Sementara itu, konsep dinamika sosial kelas PAI digunakan untuk memahami proses sosial yang berlangsung dalam interaksi pembelajaran sehari-hari [14]. Melalui ketiga konsep tersebut, praktik pendidikan Islam dapat dipahami tidak hanya sebagai aktivitas pedagogis, tetapi juga sebagai proses sosial yang melibatkan relasi kuasa, negosiasi makna, dan pembentukan budaya sekolah secara berkelanjutan [17].

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus pada SD IT Al-Ihsan Banjarnegara yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive karena sekolah tersebut

menunjukkan praktik penerapan Kurikulum Merdeka yang cukup intensif, khususnya pada pembelajaran berdiferensiasi, penguatan karakter religius, dan keterlibatan berbagai aktor pendidikan dalam proses pembelajaran. Pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami dinamika sosial dan relasi kuasa dalam implementasi Kurikulum Merdeka pada pembelajaran PAI secara mendalam dan kontekstual [18].

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena bertujuan memahami makna, proses, dan dinamika sosial yang berlangsung dalam penerapan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran PAI di lingkungan sekolah Islam terpadu. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman, interaksi sosial, serta praktik pendidikan yang berlangsung secara alamiah di lapangan [19]. Dalam penelitian ini, lensa relasi kuasa Michel Foucault digunakan untuk membaca bagaimana kebijakan, praktik pembelajaran, dan hubungan antaraktor membentuk pola otoritas dan produksi pengetahuan dalam lingkungan sekolah.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan yang dipilih menggunakan teknik purposive dan snowball sampling, yaitu kepala sekolah, wakil kurikulum, guru PAI/guru kelas, siswa, dan orang tua siswa. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam penerapan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran PAI sehingga data yang diperoleh dapat merepresentasikan perspektif pembuat kebijakan, pelaksana pembelajaran, peserta didik, dan pihak pendukung pendidikan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen sekolah, perangkat pembelajaran, laporan kegiatan, dan arsip kebijakan yang berkaitan dengan implementasi Kurikulum Merdeka [20].

Teknik analisis data menggunakan model analisis tematik interaktif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan dinamika sosial, relasi kuasa, dan praktik pembelajaran PAI. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk matriks, uraian naratif, dan pemetaan hubungan antaraktor agar memudahkan proses interpretasi temuan penelitian. Untuk menjaga kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu sehingga hasil penelitian memiliki tingkat keabsahan yang memadai [20].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Kurikulum sebagai Rezim Pengetahuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar Islam Terpadu berlangsung melalui penyesuaian strategi pembelajaran, penguatan pembiasaan religius, serta penggunaan perangkat ajar yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Dalam proses pembelajaran, guru menerapkan metode penjelasan materi, tanya jawab, dan pemberian soal kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Berdasarkan hasil observasi, guru beberapa kali mengaitkan materi akhlak dengan perilaku siswa di lingkungan sekolah, seperti sikap menghormati guru dan menjaga sopan santun terhadap teman sebaya. Pola pembelajaran tersebut memperlihatkan adanya upaya menghadirkan pembelajaran yang lebih partisipatif sesuai dengan karakteristik Kurikulum Merdeka. Meskipun demikian, otoritas guru tetap tampak dominan dalam mengendalikan arah pembelajaran, menentukan ritme kelas, serta menjaga ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sekolah.

Situasi pembelajaran di kelas menunjukkan bahwa sebagian siswa terlihat aktif ketika guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman sehari-hari. Akan tetapi, beberapa siswa lain masih cenderung pasif dan menunggu arahan guru sebelum menjawab pertanyaan. Dalam hasil wawancara, salah satu guru menyampaikan bahwa tidak semua siswa memiliki keberanian yang sama untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Guru menyatakan bahwa, “anak-anak ada yang langsung aktif

kalau diajak diskusi, tetapi ada juga yang harus ditunjuk atau didekati dulu supaya mau berbicara.” Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran partisipatif masih dipengaruhi oleh karakteristik dan kesiapan belajar peserta didik.

Implementasi kebijakan kurikulum tampak melalui penyusunan modul ajar, pembiasaan religius sebelum pembelajaran, serta pengawasan kepala sekolah terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan hasil observasi, pembelajaran diawali dengan salam, doa bersama, dan pengecekan kehadiran siswa sebelum guru menyampaikan materi inti. Sekolah juga membiasakan siswa untuk menjaga kedisiplinan, berpakaian rapi, dan menggunakan bahasa yang sopan selama berada di lingkungan sekolah. Guru diberikan ruang untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa, tetapi sekolah tetap menekankan pencapaian target hafalan, pembentukan akhlak, dan kedisiplinan peserta didik sebagai bagian penting dalam pembelajaran PAI. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka di SDIT tidak sepenuhnya dimaknai sebagai kebebasan belajar tanpa batas, melainkan sebagai proses adaptasi antara kebijakan pendidikan nasional dengan identitas keislaman sekolah.

Berdasarkan hasil observasi selama penelitian, suasana pembelajaran PAI di kelas berlangsung cukup kondusif meskipun karakter siswa terlihat beragam. Sebagian siswa menunjukkan antusiasme ketika guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman sehari-hari, sedangkan beberapa siswa lain masih perlu diarahkan agar tetap fokus selama pembelajaran berlangsung. Guru beberapa kali menggunakan pendekatan personal dengan mendatangi meja siswa yang kurang memperhatikan pembelajaran dan memberikan pertanyaan sederhana agar siswa kembali terlibat dalam kegiatan belajar. Situasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran berdiferensiasi tidak selalu berjalan secara ideal, tetapi memerlukan penyesuaian terus-menerus sesuai kondisi kelas dan karakter peserta didik.

Dalam proses pembelajaran, guru juga terlihat berupaya menciptakan suasana belajar yang lebih komunikatif melalui penggunaan cerita, contoh kontekstual, dan diskusi sederhana. Ketika guru menjelaskan materi tentang akhlak, beberapa siswa terlihat mulai menghubungkan materi dengan pengalaman yang mereka alami di rumah maupun di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembelajaran PAI tidak hanya diarahkan pada pemahaman materi secara teoritis, tetapi juga pada upaya membangun kesadaran siswa mengenai penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran PAI di SDIT tidak berlangsung sebagai proses teknis yang bersifat netral, melainkan sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh relasi kuasa antaraktor pendidikan. Kebijakan kurikulum berfungsi sebagai rezim pengetahuan yang membentuk standar pembelajaran, pola interaksi, dan mekanisme pengawasan di lingkungan sekolah. Dalam perspektif Michel Foucault, kekuasaan bekerja melalui produksi pengetahuan, regulasi, serta normalisasi terhadap praktik yang dianggap benar dalam lembaga pendidikan [2]. Temuan tersebut tampak pada proses penyusunan modul ajar, pelaksanaan proyek pembelajaran, hingga supervisi akademik yang dilakukan sekolah sebagai bentuk pengendalian terhadap praktik pembelajaran guru. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kurikulum bukan sekadar perangkat administratif, tetapi juga instrumen pembentukan budaya dan legitimasi pendidikan. Selain itu, praktik implementasi Kurikulum Merdeka memperlihatkan adanya ruang agensi bagi guru dalam menerjemahkan kebijakan sesuai kebutuhan peserta didik dan karakter sekolah Islam terpadu [17].

Selain itu, penerapan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PAI juga memperlihatkan bahwa perubahan kebijakan pendidikan tidak selalu dapat diterapkan secara seragam pada setiap lembaga pendidikan. Setiap sekolah memiliki karakteristik budaya, sumber daya, dan pola interaksi sosial yang berbeda sehingga proses implementasi berlangsung melalui penyesuaian yang beragam. Dalam konteks SDIT, identitas keislaman sekolah menjadi faktor yang turut memengaruhi cara guru memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu,

praktik pembelajaran PAI tidak hanya diarahkan pada pencapaian kompetensi akademik, tetapi juga pada penguatan nilai religius, pembiasaan ibadah, dan pembentukan karakter peserta didik secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kurikulum berlangsung melalui proses adaptasi antara tuntutan kebijakan nasional dengan kultur pendidikan Islam yang berkembang di lingkungan sekolah [3].

Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa dinamika sosial dan relasi kuasa dalam penerapan Kurikulum Merdeka dipengaruhi oleh hubungan sosial antaraktor terbukti dalam temuan penelitian. Akan tetapi, relasi tersebut tidak bersifat tetap karena dipengaruhi oleh kapasitas guru, pola kepemimpinan kepala sekolah, dukungan orang tua, serta kultur kelembagaan sekolah. Guru yang memiliki kemampuan pedagogis dan pemahaman kurikulum yang baik cenderung lebih adaptif dalam mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Sebaliknya, keterbatasan pemahaman terhadap kurikulum menyebabkan sebagian guru masih mempertahankan pola pembelajaran konvensional [21]. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Ulfah dan Adityas yang menjelaskan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka sering kali menghadirkan pergulatan identitas profesional guru dalam menghadapi tuntutan perubahan kebijakan pendidikan [11]. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kurikulum tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh kemampuan lembaga membangun kultur kolaboratif dan ruang refleksi pedagogis bagi guru.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa praktik pengawasan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di SDIT tidak selalu dilakukan melalui kontrol formal, tetapi juga melalui pembiasaan dan budaya sekolah yang berlangsung secara terus-menerus. Pembiasaan religius seperti doa bersama, murojaah hafalan, menjaga adab berbicara, serta kedisiplinan berpakaian menjadi bagian dari mekanisme pembentukan perilaku peserta didik di lingkungan sekolah. Dalam perspektif Foucault, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk normalisasi yang bekerja melalui pembiasaan keseharian sehingga peserta didik secara perlahan menyesuaikan diri terhadap nilai dan aturan yang berlaku di sekolah [4]. Implementasi Kurikulum Merdeka di SDIT tidak hanya berkaitan dengan perubahan administrasi pembelajaran, tetapi juga perubahan strategi guru dalam membangun partisipasi siswa melalui pendekatan kontekstual, pembiasaan religius, dan komunikasi pembelajaran yang lebih interaktif [22].

3.2 Negoisasi Otoritas Guru dan Partisipasi Siswa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara guru dan siswa dalam pembelajaran PAI berlangsung melalui proses negosiasi antara otoritas guru dan partisipasi siswa di kelas. Guru tetap menjalankan fungsi pengendalian melalui pengarahan materi, pengawasan aktivitas belajar, serta evaluasi terhadap hasil pekerjaan siswa. Akan tetapi, proses pembelajaran juga memberikan ruang partisipasi kepada siswa melalui kegiatan tanya jawab, diskusi sederhana, dan penyampaian pendapat terkait materi pembelajaran. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran pola pembelajaran dari yang semula berpusat sepenuhnya pada guru menuju pembelajaran yang lebih interaktif, meskipun kontrol guru masih terlihat cukup kuat dalam praktik pembelajaran sehari-hari.

Berdasarkan hasil observasi, guru beberapa kali memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat sebelum guru memberikan penjelasan lanjutan terkait materi yang dipelajari. Pada saat pembelajaran berlangsung, suasana kelas terlihat cukup kondusif meskipun beberapa siswa sesekali berbicara dengan teman sebangku ketika guru menjelaskan materi. Dalam situasi tersebut, guru menegur siswa secara langsung dan mengarahkan perhatian siswa kembali pada pembelajaran. Guru juga terlihat mendekati beberapa siswa yang kurang fokus dan memberikan pertanyaan sederhana agar siswa tetap terlibat dalam kegiatan belajar di kelas.

Partisipasi siswa dalam pembelajaran menunjukkan karakteristik yang beragam. Sebagian siswa terlihat aktif dalam menjawab pertanyaan dan terlibat dalam diskusi kelas, sedangkan sebagian lainnya masih cenderung pasif dan menunggu arahan guru. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kemampuan

belajar, tingkat kepercayaan diri, dan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dalam hasil wawancara, salah satu guru menyampaikan bahwa terdapat siswa yang mudah aktif ketika pembelajaran dilakukan melalui cerita atau contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, tetapi terdapat pula siswa yang memerlukan pendampingan lebih lanjut agar mau berbicara di depan kelas. Guru menyatakan bahwa, “kalau materinya dikaitkan dengan pengalaman mereka biasanya lebih mudah merespons, tetapi ada beberapa anak yang memang harus dibimbing pelan-pelan supaya mau ikut aktif.”

Relasi antara guru dan siswa dalam pembelajaran PAI juga berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan belajar dan pembentukan disiplin siswa. Guru berupaya memberikan ruang partisipasi kepada peserta didik tanpa mengabaikan aturan dan target pembelajaran yang telah ditentukan sekolah. Berdasarkan hasil observasi, guru tetap mengontrol jalannya pembelajaran melalui pengaturan tempat duduk, pengawasan terhadap tugas siswa, serta pemberian arahan ketika suasana kelas mulai kurang kondusif. Oleh karena itu, praktik pembelajaran berlangsung melalui kombinasi antara pendekatan partisipatif dengan mekanisme pengawasan dan pengendalian kelas. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di lingkungan SDIT tetap dipengaruhi oleh budaya sekolah, otoritas guru, dan nilai-nilai religius yang menjadi identitas lembaga pendidikan.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa pola interaksi antara guru dan siswa dipengaruhi oleh suasana emosional di kelas. Ketika guru memberikan apresiasi terhadap jawaban siswa, suasana kelas terlihat lebih aktif dan beberapa siswa lain mulai berani mengemukakan pendapat. Akan tetapi, terdapat pula situasi ketika siswa memilih diam karena merasa kurang percaya diri terhadap jawaban yang dimiliki. Dalam kondisi tersebut, guru biasanya memberikan motivasi atau bantuan pertanyaan tambahan agar siswa tetap mau berpartisipasi dalam pembelajaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi siswa tidak hanya dipengaruhi oleh metode pembelajaran, tetapi juga dipengaruhi oleh pendekatan komunikasi guru dalam membangun rasa aman dan nyaman selama proses belajar berlangsung.

Selain itu, pembelajaran PAI di SDIT juga memperlihatkan adanya kombinasi antara pendekatan akademik dan pembentukan karakter religius. Guru tidak hanya menilai hasil tugas siswa, tetapi juga memperhatikan sikap, kedisiplinan, dan cara siswa berinteraksi dengan teman maupun guru selama pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, proses pembelajaran tidak hanya berfungsi untuk mencapai target kurikulum, tetapi juga menjadi sarana pembentukan budaya religius dan pembiasaan perilaku sosial peserta didik di lingkungan sekolah.

Temuan mengenai negosiasi otoritas guru dan partisipasi siswa menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran PAI tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui desain kebijakan kurikulum. Praktik pembelajaran berlangsung melalui proses negosiasi, komunikasi, dan distribusi peran antara guru dan peserta didik di ruang kelas. Dalam pembelajaran PAI, guru tetap menempati posisi otoritatif sebagai pengarah pembelajaran dan pembentuk nilai religius siswa. Partisipasi siswa merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan proses pembelajaran. Tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan keterlibatan aktif siswa secara kognitif, afektif, dan sosial dalam kegiatan belajar. Akan tetapi, dalam praktik pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan, masih ditemukan rendahnya partisipasi siswa, yang ditandai dengan sikap pasif, kurangnya interaksi, minimnya inisiatif bertanya atau berpendapat, serta ketergantungan pada guru sebagai satu satunya sumber belajar. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran belum sepenuhnya mampu menciptakan lingkungan belajar yang partisipatif dan bermakna [23]. Namun demikian, Kurikulum Merdeka memberikan ruang yang lebih luas bagi siswa untuk menyampaikan pendapat, bekerja dalam kelompok, serta terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya pergeseran relasi kuasa dari pola yang sepenuhnya hierarkis menuju pola yang lebih dialogis [4], Temuan ini sejalan dengan pandangan Blumer bahwa interaksi sosial dalam pendidikan terbentuk melalui proses pertukaran makna yang berlangsung secara terus-menerus antaraktor [14]. Dengan demikian, pembelajaran PAI

tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan materi keagamaan, tetapi juga membentuk pengalaman sosial dan religius siswa melalui interaksi yang berlangsung selama proses pembelajaran.

Temuan ini menunjukkan jika pembelajaran PAI tidak hanya berfungsi untuk memindahkan pengetahuan agama, tetapi juga sebagai tempat untuk membentuk interaksi sosial, belajar berkomunikasi, dan menguatkan karakter siswa. Metode pembelajaran yang sesuai dengan konteks dan komunikatif membuat siswa lebih mudah mempelajari materi dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penerapan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PAI di SDIT menunjukkan usaha untuk menciptakan pembelajaran yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pembentukan karakter religius siswa [24]. Hasil observasi menunjukkan bahwa suasana kelas menjadi lebih aktif ketika guru menggunakan contoh pembelajaran yang dekat dengan pengalaman sehari-hari siswa. Pada saat guru mengaitkan materi akhlak dengan perilaku siswa di rumah maupun di lingkungan sekolah, beberapa siswa terlihat lebih berani menyampaikan pendapat dan pengalaman pribadi mereka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual dalam pembelajaran PAI mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Temuan ini sejalan dengan penelitian [16] yang menjelaskan bahwa pembelajaran yang memberi ruang pengalaman sosial peserta didik cenderung menciptakan interaksi yang lebih komunikatif dan partisipatif di kelas.

Di sisi lain, hasil penelitian memperlihatkan bahwa keterlibatan siswa dalam pembelajaran masih dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi dan strategi pembelajaran guru. Siswa yang memiliki tingkat kepercayaan diri lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam diskusi dan kegiatan kelompok, sedangkan siswa yang pasif membutuhkan pendekatan interpersonal yang lebih intensif dari guru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi memerlukan kemampuan pedagogis guru dalam memahami karakteristik peserta didik secara lebih mendalam. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya bergantung pada perubahan dokumen kurikulum, tetapi juga pada kesiapan guru dalam mengelola dinamika sosial pembelajaran di kelas [17].

Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa praktik pendidikan Islam berlangsung dalam ketegangan antara tujuan ideal dan kondisi sosial empiris juga terbukti dalam temuan penelitian. Guru pada tingkat mikro terus menerjemahkan kebijakan Kurikulum Merdeka sesuai pengalaman, kepentingan, dan keterbatasan yang mereka hadapi di lapangan. Di satu sisi, guru dituntut menerapkan pembelajaran aktif dan berdiferensiasi, tetapi di sisi lain tetap harus menjaga target hafalan, disiplin kelas, serta capaian akademik siswa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan selalu melibatkan proses adaptasi dan interpretasi sosial [13]. Temuan ini sejalan dengan konsep teacher agency yang menempatkan guru sebagai aktor aktif dalam menentukan arah praktik pendidikan berdasarkan konteks kelembagaan dan pengalaman profesional yang dimiliki [7]. Proses pembelajaran tidak hanya melibatkan peran guru, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal, penting bagi guru untuk memahami dinamika interaksi kekuasaan dalam proses belajar mengajar, mengembangkan kompetensi profesional, menggunakan metode pembelajaran memanfaatkan yang media tepat, serta pembelajaran inovatif untuk meningkatkan partisipasi siswa [25]. Oleh karena itu, implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PAI perlu dipahami sebagai praktik sosial yang bersifat dinamis, bukan sekadar pelaksanaan kebijakan secara linear.

3.3 Resistensi Adaptif terhadap Tuntutan Perubahan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran PAI tidak hanya dipengaruhi oleh interaksi antara guru dan siswa, tetapi juga oleh dukungan lingkungan sekolah dan keterlibatan orang tua. Sekolah berupaya membangun komunikasi dengan orang tua terkait perkembangan belajar dan perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran. Hubungan tersebut tampak melalui penyampaian informasi mengenai kegiatan pembelajaran, pembiasaan religius, dan

perkembangan sikap siswa di sekolah. Dengan demikian, implementasi kurikulum berlangsung melalui keterlibatan berbagai pihak yang saling mendukung proses pendidikan.

Berdasarkan hasil observasi, sekolah secara rutin membiasakan kegiatan religius sebelum pembelajaran dimulai, seperti membaca doa bersama, murojaah hafalan pendek, dan membiasakan siswa memberi salam kepada guru. Guru juga beberapa kali mengingatkan siswa untuk menjaga sikap sopan santun selama berada di lingkungan sekolah. Dalam praktiknya, tidak seluruh siswa langsung mengikuti pembiasaan tersebut secara tertib. Beberapa siswa masih perlu diingatkan untuk fokus ketika berdoa bersama atau ketika guru memberikan arahan di kelas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan disiplin dan pembiasaan religius berlangsung secara bertahap melalui pengawasan dan pembimbingan guru.

Selain berperan sebagai penyampai materi, guru juga menjalankan fungsi pembimbing dalam membentuk sikap dan karakter peserta didik. Dalam hasil wawancara, salah satu guru menyampaikan bahwa tantangan penerapan Kurikulum Merdeka terletak pada penyesuaian strategi pembelajaran dengan karakter siswa yang beragam. Guru menyatakan bahwa, “anak-anak sekarang maunya pembelajaran yang tidak monoton, jadi guru harus lebih kreatif supaya mereka tetap fokus, tetapi target pembelajaran juga tetap harus tercapai.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa guru dituntut untuk mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi siswa sekaligus menjaga ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sekolah.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Sebagian orang tua mendukung penerapan pembelajaran yang lebih aktif dan fleksibel, tetapi sebagian lainnya masih memandang bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang lebih banyak berpusat pada guru dan tugas tertulis. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan bagi sekolah dalam menyesuaikan kebijakan Kurikulum Merdeka dengan harapan orang tua siswa.

Secara keseluruhan, penerapan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran PAI di Sekolah Dasar Islam Terpadu memperlihatkan adanya proses adaptasi antara kebijakan pendidikan nasional dengan budaya sekolah Islam. Pembelajaran tidak hanya diarahkan pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan karakter religius, penguatan kedisiplinan, dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik pendidikan berlangsung melalui hubungan sosial, komunikasi, dan negosiasi antaraktor pendidikan yang membentuk dinamika pembelajaran dalam kehidupan sekolah sehari-hari.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa resistensi adaptif terhadap perubahan menjadi bagian penting dalam proses implementasi Kurikulum Merdeka di SDIT. Resistensi tersebut tidak selalu berbentuk penolakan terbuka, tetapi muncul dalam bentuk kehati-hatian, penyesuaian bertahap, serta negosiasi antara sekolah dan orang tua mengenai praktik pembelajaran yang dianggap sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam beberapa kasus, orang tua masih memandang keberhasilan pendidikan melalui ukuran akademik konvensional, sehingga pembelajaran berbasis proyek dan diferensiasi memerlukan penjelasan serta komunikasi yang lebih intensif dari pihak sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka tidak hanya bergantung pada kesiapan sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan orang tua dan lingkungan sosial di sekitar peserta didik [12]. Temuan ini sejalan dengan penelitian Khofifah, Mislikhah, dan Usriyah yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat dipengaruhi oleh kemampuan sekolah membangun kepemimpinan kolaboratif dan komunikasi pedagogis yang efektif [1].

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa komunikasi antara sekolah dan orang tua memiliki pengaruh terhadap penerimaan terhadap kebijakan Kurikulum Merdeka. Sebagian orang tua masih memandang keberhasilan belajar melalui capaian nilai akademik dan hafalan siswa, sehingga pendekatan pembelajaran berbasis proyek terkadang dipahami belum sepenuhnya mampu meningkatkan

kemampuan akademik peserta didik. Oleh karena itu, sekolah perlu membangun komunikasi yang lebih terbuka mengenai tujuan pembelajaran, bentuk evaluasi, serta perkembangan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Melalui komunikasi yang intensif, proses implementasi kurikulum dapat berjalan lebih adaptif dan memperoleh dukungan yang lebih kuat dari lingkungan keluarga peserta didik [1].

Penguatan argumen hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka pada pembelajaran PAI di SDIT tidak berlangsung dalam ruang pendidikan yang sepenuhnya netral, tetapi dipengaruhi oleh hubungan sosial, budaya sekolah, dan relasi kuasa antaraktor pendidikan. Guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua memiliki posisi dan pengaruh masing-masing dalam menentukan arah praktik pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Dalam kondisi tersebut, penerapan Kurikulum Merdeka tidak hanya berkaitan dengan perubahan perangkat pembelajaran, tetapi juga menyangkut proses penyesuaian budaya belajar, pola komunikasi, dan pembentukan nilai yang berlangsung secara terus-menerus di lingkungan sekolah.

Selain dipengaruhi oleh faktor internal sekolah, implementasi Kurikulum Merdeka juga dipengaruhi oleh kondisi sosial peserta didik dan latar belakang keluarga. Sebagian siswa memiliki dukungan belajar yang baik dari lingkungan keluarga sehingga lebih mudah mengikuti pembelajaran berbasis proyek dan diskusi. Akan tetapi, terdapat pula siswa yang masih memerlukan pendampingan lebih lanjut karena terbiasa dengan pola pembelajaran konvensional yang berpusat pada guru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan kurikulum tidak hanya menuntut kesiapan sekolah dan guru, tetapi juga kesiapan budaya belajar peserta didik dan orang tua dalam menerima perubahan pola pembelajaran. Oleh karena itu, implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan proses adaptasi sosial yang berlangsung secara bertahap dalam lingkungan pendidikan Islam.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka pada pembelajaran PAI di SDIT berlangsung melalui proses penyesuaian yang terus berkembang sesuai kondisi sosial sekolah. Dalam praktiknya, guru tidak hanya berhadapan dengan tuntutan administratif kurikulum, tetapi juga harus mampu menjaga stabilitas suasana kelas, membangun komunikasi dengan orang tua, dan menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa yang beragam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan kurikulum tidak dapat dipahami sebagai perubahan teknis semata, melainkan sebagai proses sosial yang melibatkan hubungan antaraktor pendidikan secara berkelanjutan [10].

Selain itu, budaya sekolah Islam terpadu turut memengaruhi cara Kurikulum Merdeka diterapkan dalam pembelajaran PAI. Pembiasaan religius, kedisiplinan, dan penguatan akhlak tetap menjadi fokus utama sekolah meskipun pendekatan pembelajaran mulai diarahkan lebih fleksibel dan partisipatif. Dengan demikian, implementasi Kurikulum Merdeka di SDIT memperlihatkan adanya upaya mengintegrasikan tuntutan kebijakan pendidikan nasional dengan identitas keislaman sekolah dalam kehidupan pembelajaran sehari-hari. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa praktik pendidikan Islam berlangsung melalui proses adaptasi, negosiasi, dan pembentukan budaya kelembagaan yang terus berkembang sesuai dinamika sosial sekolah [13].

Secara argumentatif, hipotesis penelitian dapat dinyatakan terbukti karena penerapan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran PAI di SDIT memperlihatkan adanya relasi kuasa struktural, mikro, dan eksternal yang saling memengaruhi dalam praktik pendidikan sehari-hari. Akan tetapi, penelitian ini memiliki keterbatasan karena dilakukan pada satu situs penelitian sehingga belum dapat menggambarkan variasi konteks lembaga pendidikan Islam secara lebih luas. Oleh sebab itu, penelitian lanjutan berbasis multisitus perlu dilakukan agar perbedaan karakter sekolah, budaya kelembagaan, latar sosial peserta didik, serta pola hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dibandingkan secara lebih komprehensif [18]. Kajian lanjutan juga penting untuk memperkuat pengembangan studi sosiologi pendidikan Islam, khususnya dalam memahami hubungan antara kebijakan pendidikan, praktik pembelajaran, dan dinamika sosial dalam implementasi Kurikulum Merdeka.

4. KESIMPULAN

Implementasi Kurikulum Merdeka pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDIT bukan sekadar pemenuhan aspek administratif, melainkan proses sosial yang melibatkan negosiasi pengetahuan, nilai keagamaan, dan relasi kuasa antaraktor sekolah. Analisis melalui perspektif sosiologi pendidikan dan kerangka pemikiran Michel Foucault menunjukkan bahwa dinamika kurikulum ini sangat dipengaruhi oleh pola komunikasi dan legitimasi otoritas di lingkungan lembaga. Secara praktis, keberhasilan kurikulum menuntut adanya budaya belajar yang partisipatif serta ruang refleksi pedagogis bagi guru guna menyelaraskan strategi instruksional dengan karakter siswa. Mengingat keterbatasan metode studi kasus yang bersifat kontekstual dalam penelitian ini, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menerapkan pendekatan kompratif atau etnografi jika panjang pada cakupan lembaga pendidikan Islam yang lebih luas. Hal ini penting untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kesiapan sosial dan budaya dalam mendukung transformasi kurikulum yang berorientasi pada pembentukan karakter.

REFERENSI

- [1] E. N. K. S. M. L. Usriyah, "Teacher Leaders' Strategies in Implementing Deep Learning within the Merdeka Curriculum: A Multi-Case Study in Islamic Primary Schools," *Al-Adzka J. Ilm. Pendidik. Guru Madrasah Ibtidaiyah*, vol. 15, no. 2, pp. 1–15, 2025, doi: <https://doi.org/10.18592/aladzkapgmi.v15i2.18190>.
- [2] M. Foucault, *POWER/KNOWLEDGE Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. New York: Pantheon Books, 1980.
- [3] T. A. K. G. S. L. A. N. Arsai, "Curriculum Reform Meets Classroom Realities: Selected Indonesian Teachers' Perspectives on the MerdekaCurriculum," *J. Res. Innov. Lang.*, vol. 7, no. 1, pp. 1–20, 2025.
- [4] M. Foucault, *Discipline & Punish The Birth Of The Prison*. New York: Vintage Books, 1995.
- [5] N. Syafi'ah and Muhammad Hanif, "Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Studi Kasus di SMK Pesantren Al-Kautsar Purwokerto," *Glob. J. Ilm. Multidisiplin*, vol. 1, no. 1, p. 33, 2024.
- [6] K. M. Hanif, "The Implementation of Tasamuh ala Ahlussunah School in Learning Islamic Education: A Case in Ma'arif High School Purbalingga, Indonesia," *Int. J. Soc. Sci. Relig.*, vol. 1, no. 1, pp. 55–68, 2020, doi: <https://doi.org/10.53639/ijssr.v1i1.6>.
- [7] M. P. G. B. S. Robinson, *Teacher Agency: An Ecological Approach*. London: Bloomsbury Academic, 2015.
- [8] M. R. Nur and Restu Luthfiani Maulida, "EFL Teacher Agency in Merdeka Curriculum," *JADEs J. Acad. English Educ.*, vol. 5, no. 1, pp. 119–134, 2024.
- [9] D. R. Oktaviana, Yusdin Bin Mahmudin Gagaramusu, Dyah Rahmawati, Rizal, and Danti Indriastuti Purnamasari, "Managing Islamic Religious Education in the Merdeka Curriculum: Structured Planning, Instructional Enactment, and the Role of Principal Leadership," *J. Innov. Res. Prim. Educ.*, vol. 5, no. 2, 2026.
- [10] M. Fullan, *Leading in a Culture of Change*. San Francisco: Jossey-Bass, 2020.
- [11] A. Ulfah and M. Tolkhah Adityas, "Preserving professional identity: teachers' voices and internal struggle on the discourse of the kurikulum merdeka," *J. JPSD (Jurnal Pendidik. Sekol. Dasar)*, vol. 10, no. 2, pp. 1–15, 2023.
- [12] N. A. M. Hanif, "Pendidikan dan Kekuasaan: Antara Pembebasan dan Dominasi Perspektif Michel Foucault, Pierre Bourdieu, dan Paulo Freire," *J. Inov. Penelit. Ilmu Pendidik. Indones.*, vol. 2, no. 4, p. 204, 2025.
- [13] P. Bourdieu, *The Logic of Practice*. California: Stanford University Press, 1990.
- [14] H. Blumer, *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. California: University of

- California Press, 1969.
- [15] P. H. S. Gümüş, *Science Mapping of the Knowledge Base on Educational Leadership and Management, 1960 to 2020*. Bingley: Emerald Publishing, 2022.
- [16] F. Y. M. A. Bashith, "Implementasi Model Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran PAI," *JIIP (Jurnal Ilm. Ilmu Pendidikan)*, vol. 8, no. 7, pp. 7289–7290, 2025.
- [17] G. B. M. P. S. Robinson, "The role of beliefs in teacher agency," *Teach. Teach. theory Pract.*, vol. 21, no. 6, pp. 624–640, 2015, doi: <https://doi.org/10.1080/13540602.2015.1044325>.
- [18] R. K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sage Publications., 2023.
- [19] J. W. Creswell and C. N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications, 2024.
- [20] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. London: Sage Publications, 2024.
- [21] T. Kumayas, Grace Shirley Luntungan, Alfons Napoleon Arsai, and Devilito Prasetyo Tatipang, "Curriculum Reform Meets Classroom Realities: Selected Indonesian Teachers' Perspectives on the Merdeka Curriculum," *REiLA J. Res. Innov. Lang.*, vol. 7, no. 1, pp. 1–20, 2025.
- [22] M. A. M. Hanif, "Peran Guru Dalam Penguatan Literasi Digital Peserta Didik Smp Raden Fatah Cimanggu," *Learn. J. Inov. Penelit. Pendidik. dan Pembelajaran*, vol. 6, no. 1, pp. 163–166, 2026, doi: <https://doi.org/10.51878/learning.v6i1.8904>.
- [23] Iskandar, "Peran Gaya Komunikasi Guru Dalam Meningkatkan Partisipasi Siswa Pada Pembelajaran: Sebuah Studi Pustaka," *Al-Zayn J. Ilmu Sos. Huk.*, vol. 4, no. 2, pp. 4024–4026, 2026.
- [24] M. K. A. M. Hanif, "Pendekatan Sosial-Religius Dalam Pembelajaran Pai Untuk Penguatan Moderasi Beragama Di Smp Raden Fatah Cimanggu," *Pendas J. Ilm. Pendidik. Dasar*, vol. 10, no. 04, pp. 23–30, 2025, doi: <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.37884>.
- [25] G. M. A. S. E. Inderasari, "Analisis Pragmatisme Kekuasaan Interaksi Guru Siswa Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia," *J. Pendidik. Bhs. dan Sastra Indones.*, vol. 21, no. 1, pp. 237–242, 2025.